

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, maka untuk menghubungkan pulau-pulau tersebut mutlak diperlukan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara. Eksistensi sub sektor perhubungan laut merupakan salah satu aktivitas yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan yang menghendaki kesatuan teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya pengetahuan yang terakumulasi dalam mempertahankan nusantara.

Kalangan pelayaran internasional sudah lama merasakan hambatan yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan bongkar muat yang mencapai sekitar 1.000ton perhari untuk muatan umum (general cargo). Selain itu, biaya tenaga kerja yang merupakan bagian terbesar dari pengeluaran untuk keperluan operasional, menunjukkan kenaikan yang cepat di hampir seluruh negara di dunia. Hal ini berarti bahwa waktu yang di perlukan untuk berlabuh menjadi lebih lama, frekuensi pelayaran menjadi lebih rendah, dan produktivitas angkutan menjadi lebih rendah pula. Sedangkan di lain pihak biaya operasional pelayaran bertambah meningkat. Gagasan-gagasan penggunaan peti kemas (container), serta peti kemas apung (lash), merupakan usaha-usaha ke arah pemecahan masalah kelambatan bongkar muat yang pada akhirnya merupakan perombakan pola pengangkutan laut pada umumnya. Pada pertengahan tahun 1950-an, Malcolm McLean, pemilik perusahaan angkutan truk, dengan latar belakang pemikiran mengikutsertakan angkutan truk melalui laut. Perusahaan Sea-Land yang melakukan operasinya antara Puerto Rico dan pantai timur Amerika Serikat kemudian diikuti oleh Matson yang memperkenalkan angkutan dengan peti kemas dari Hawaii ke pantai timur Amerika Serikat. (Amir M.S,1997).

Mengingat semakin tumbuhnya perusahaan usaha bongkar muat barang dan jasa melalui laut serta sejalan dengan berkembangnya kegiatan pengangkutan laut,

maka pemerintah berusaha mengatur kegiatan perusahaan pengangkutan laut melalui penerbitan Inpres No. 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi yang kemudian diperbaharui dengan Inpres No. 3 Tahun 1991 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi. Dalam Inpres tersebut antara lain mengatur bahwa untuk mengurangi biaya bongkar muat barang yang meliputi stevedoring, cargodoring, receiving dan delivery, maka kegiatan bongkar muat barang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk tujuan tersebut. Dari semua rangkaian kegiatan bongkar muat barang dalam hal ini yang dibebani tanggung jawab atas barang tersebut adalah perusahaan bongkar muat yang berstatus badan hukum sesuai dengan SK Menhub nomor KM 13 tahun 1989 tanggal 22 Februari 1989. Perusahaan bongkar muat untuk menjalankan usahanya wajib mempunyai ijin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ijin usaha tersebut diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan atas nama Menteri. Peranan pengusaha bongkar muat barang yang rangkaian kegiatannya meliputi pekerjaan stevedoring, cargodoring, dan receiving/ delivery dapat menunjang pembangunan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi kelancaran dan keamanan lalu lintas barang di pelabuhan. (Amir M.S,1997).

Perkembangan dunia semakin maju ditandai dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat. Perusahaan sebagai produsen dituntut mampu mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan peralatan bongkar muat barang dengan pelayanan kualitas pelayanan (*service quality*) kepada pelanggan.. Kegiatan bisnis depo petikemas oleh PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) cabang Pekanbaru pada dasarnya adalah sebagai jasa.

Pelayanan kegiatan menaikkan dan menurunkan (bongkar dan muat) atau kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh eksportir dan importir, khususnya di Sumatera Utara. Kecakapan dan keterampilan sumber daya manusia serta peralatan dalam merawat dan memperbaiki alat bongkar muat peti kemas harus terus dikembangkan.

Keadaan sekarang ini banyak pihak pengguna jasa baik pengirim maupun penerima barang yang kecewa dengan pelayanan jasa bongkar muat barang karena banyaknya resiko yang timbul terhadap barang yang dikirim oleh pengguna jasa, sehingga mengakibatkan kerugian. Oleh sebab itu harus ada kejelasan tanggung jawab dari perusahaan bongkar muat barang, kejelasan resiko terhadap barang yang dikirim oleh pengguna jasa. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengangkat suatu masalah khususnya di Depo PT. Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Pekanbaru. Sumber ini saya ambil langsung dengan melakukan wawancara kepada costumer atau pengguna jasa.

Maka Dari Itu Penulis Tertarik Untuk Membahas Dan Mengambil Judul **“Pelaksanaan Bongkar Muat Peti Kemas Di Depo PT. Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Pekanbaru”**.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bongkar muat barang yang dilakukan di Depo PT. Salam Pacific Indonesia Lines.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi di PT. Salam Pasicific Indonesia Lines dalam melaksanakan bongkar muat.

1.2.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Sebagai bahan masukan bagi instansi dalam hal pelaksanaan proses marine survey. Sehingga perusahaan dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu kegiatan pemeriksaan kapal agar lebih baik lagi di masa yang akan datang dan dapat mencapai tujuan secara efektif.
2. Penulis dapat menambah ilmu dan pengalaman baru dalam dunia kerja yang di peroleh pada saat praktek darat. Sehingga ilmu dan pengalaman bisa diterapkan apabila dimasa yang akan datang bekerja dibidang yang terkait.

1.3 Perumusan masalah

Peran PT. Salam Pacific Indonesia Lines mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, untuk itu agar pembahasan karya tulis nantinya sesuai dengan topik dan tidak meluas kemana-mana, maka penulis membatasi pada masalah.

1. Bagaimana pelaksanaan bongkar muat barang yang dilakukan di Depo PT Salam Pacific Indonesia Lines?
2. Apa saja hambatan yang di hadapi PT. Salam Pacific Indonesia Lines dalam melaksanakan bongkar muat?

1.4 Pembatasan masalah

Dengan keterbatasan pengetahuan penulis yang dapat dari studi pustaka dan pengetahuan yang diperoleh dari lapangan. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang teori-teori dan pelaksanaan bongkar muat di PT. Salam Pacific Indonesia Lines.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana penyusunan Proposal Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunan adalah sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN (Indonesia)

LEMBAR PENGESAHAN (Inggris)

ABSTRAK (Indonesia)

ABSTRAK (Inggris)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan dan Kegunaan penelitian

1.3 Perumusan Masalah

1.4 Perbatasan Masalah

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Definisi Proses

2.1.2 Definisi Pelaksanaan

2.1.3 Definisi Bongkar

2.1.4 Definisi Muat

2.1.5 Definisi Bongkar Muat

2.1.6 Definisi Peti Kemas

2.1.7 Definisi Depo

2.1.8 Studi Penelitian Terdahulu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.3 Teknik Analisis Data

3.4 Jadwal Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS